

# LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahi rahmanirrahim.....*

Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Khadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan **LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020** dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan Visi dan Misi organisasi selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam kerangka perwujudan tujuan RENSTRA Perangkat Daerah.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan, data-data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bangkalan, yaitu

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”**

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan serta petunjuk Nya, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, 25 Pebruari 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN**



**Ir. H. MOH. TAUFAN ZS., MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 196406101992021002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	5
E. Organisasi.....	6
F. Permasalahan dan Isu Strategis.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
A. Perencanaan Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	16
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
A. Analisis Pencapaian Kinerja Setda Tahun 2020 .....	21
B. Kinerja Keuangan.....	42
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	45
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
Lampiran 1 : Matriks Renstra Setda 2018 – 2023	
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan 2020	
Lampiran 3 : Prestasi yang diraih	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandate yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 disusun. LKj ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan selama tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, sasaran dan target yang dicapai dengan menunjukkan hasil yang baik. Kedepan diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur. Hasil pengukuran dapat dijadikan *Feed Back* dalam meningkatkan kinerja

pelayanan di tahun-tahun mendatang. Selain itu LKj ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, untuk Tahun 2020 ini dapat dikatakan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang ***sangat memuaskan***.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagai salah satu cermin dari komitmen terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi institusi pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan merealisasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dari tahun ke tahun termasuk didalamnya penyusunan dokumen Laporan Kinerja tahun 2020.

Secara implisit langkah di atas merupakan indikasi bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi institusi pelayanan publik karena secara organisasi, tingkat keberhasilan terhadap kinerja institusi pelayanan publik dimaksud tidak lepas dari aspek akuntabilitas yang diterjemahkan melalui instrumen yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam rangka mengetahui perkembangan kinerja dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sehingga dengan demikian mampu menjawab posisi kinerja organisasi pada saat ini dengan diimbangi oleh langkah strategis guna menjawab pertanyaan tentang kearah mana kinerja organisasi akan dikendalikan pada masa yang akan datang (*where we are to where we want to go*).

Ditinjau dari aspek waktu dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020 ini lebih merupakan instrumen tahunan yang bersifat tindak

lanjut atas pelaksanaan kebijakan yang bersifat tahunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen RENSTRA (Rencana Strategis). Oleh karena itu jika ditinjau dari substansi yang terkandung didalamnya dokumen Laporan Kinerja tahun 2020 ini merupakan mata rantai yang memiliki korelasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah sebelumnya sehingga secara berkesinambungan, mendeskripsikan tentang *progress report* yang mengacu pada rencana kinerja sebagaimana telah tersusun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya)

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

### **1. Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, serta dimaksudkan pula untuk menyiapkan

berbagai ukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dimasa yang akan datang.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada Sekretariat Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama Tahun Anggaran 2019
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

## **C. Dasar Hukum**

Adapun Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR.1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 3/A);
  - j. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No.34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf ahli sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No.70 Tahun 2019;
  - k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
  - l. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### **D. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas pada akhirnya akan memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh setiap organisasi ( dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan ) dalam kurun waktu tertentu.

#### **E. Organisasi**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No.70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
  - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
  - b) Subbagian Otonomi Daerah;
  - c) Subbagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  - a) Subbagian Pendidikan dan Kepemudaan;
  - b) Subbagian Keagamaan dan Kebudayaan;
  - c) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
3. Bagian Hukum, membawahi :
  - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Subbagian Bantuan Hukum;
  - c) Subbagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
  1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
    - a) Subbagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
    - b) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Produk Daerah;
    - c) Subbagian Penanaman Modal dan BUMD;
  2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
    - a) Subbagian Penyusunan Program;
    - b) Subbagian Pengendalian;
    - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi
    - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
  1. Bagian Umum, membawahi :
    - a) Subbagian Tata Usaha;

- b) Subbagian Kepegawaian;
- c) Subbagian Operasional;
- 2. Bagian Organisasi, membawahi :
  - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
  - c) Subbagian Pengembangan Kinerja;
- 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
  - a) Subbagian Hubungan Masyarakat;
  - b) Subbagian Dokumentasi;
  - c) Subbagian Protokol;
- 4. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahi :
  - a) Subbagian Keuangan;
  - b) Subbagian Perlengkapan dan Aset;
  - c) Subbagian Rumah Tangga .
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Staf Ahli

Staf Ahli terdiri dari:

- a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b) Staf Ahli Bidang Ekonomi ,Keuangan dan Pembangunan
- c) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia;

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretariat didukung oleh kekuatan personil sebanyak 383 orang, dengan rincian kekuatan personil PNS sebanyak 231 orang dan THL sebanyak 152 orang. Secara spesifik dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1. Jumlah aparat dalam Jabatan Struktural
  - a. Pejabat Eselon II/a = 1 orang
  - b. Pejabat Eselon II/b = 6 orang
  - c. Pejabat Eselon III/a = 10 orang
  - d. Pejabat Eselon IV/a = 30 orang

2. Jumlah aparat ditinjau dari Golongan Ruang
- |                 |   |     |       |
|-----------------|---|-----|-------|
| a. Golongan IV  | = | 21  | orang |
| b. Golongan III | = | 125 | orang |
| c. Golongan II  | = | 83  | orang |
| d. Golongan I   | = | 2   | orang |

## **F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah menghadapi permasalahan sebagai berikut :

### **1. Internal**

- a) Masih terdapat kualitas/kompetensi SDM yang rendah / kurang memadai
- b) Kurang optimalnya koordinasi antar bagian
- c) Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
- d) Terbatasnya produk hukum / tidak imbang dengan dinamika masyarakat
- e) Disiplin aparatur yg masih kurang optimal

### **2. Eksternal**

- a) Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan;
- b) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan / SO baru.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi terciptanya perencanaan yang

akurat dan *up to date* demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sedangkan Isu-isu strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah adalah :

- a. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan;
- b. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur daerah;
- c. Masih kurang optimalnya fungsi pengawasan internal daerah;
- d. Masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah;
- e. Sarana dan Prasarana kurang memadai

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab ini bersifat uraian secara umum keberadaan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Umum Perangkat Daerah, Organisasi, Permasalahan dan Isu Strategis serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi tentang beberapa hal penting dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan perjanjian kinerja Tahun 2020.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.**

Menjelaskan tentang hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2020, memuat target, realisasi, analisis capaian kinerja, realisasi anggaran serta penjabaran akuntabilitas keuangan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2020 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam menjabarkan perencanaan strategis Sekretariat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), membreakdown Renstra dari penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang kemudian menjadi kebijakan umum, tujuan, sasaran dan penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Bangkalan dalam RPJMD Tahun Anggaran 2018 – 2023 tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

#### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”**

Keberadaan visi ini merupakan perwujudan kepedulian kinerja yang harus dipedomani oleh Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan pada khususnya.

Untuk mencapai visi beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan daerah periode 2018 – 2023 telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Rumusan Misi harus mampu melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, memberikan petunjuk kelompok yang akan dilayani serta memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholder. Eksistensi Misi dalam suatu organisasi biasanya lebih bersifat konkrit dibandingkan dengan eksistensi Visi, oleh sebab itu tingkat spesifikasi yang terkandung didalam pernyataan sebuah misi, relatif lebih nampak, jika dibandingkan dengan visi dalam suatu organisasi. Misi biasanya menawarkan keunggulan yang menunjukkan

upaya peningkatan hasil kerja, peningkatan efisiensi, menawarkan inovasi serta meningkatkan gairah kerja.

Dalam pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, Sekretariat Daerah mendukung misi ke 2, yaitu : **Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi**, pada Sasaran kedua RPJMD, yang berbunyi : “Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan”. Bertitik tolak dari sasaran kedua RPJMD 2018 – 2023, Sekretariat Daerah menetapkan sebuah Tujuan Perangkat Daerah, yaitu : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan”, dengan 3 (tiga) buah indikator tujuan :

- a. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
- b. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah;
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan.

Selanjutnya dari tujuan dan indikator tujuan ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Perangkat Daerah, memuat target tahunan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dimuat di dokumen Perencanaan Kinerja atau renstra Perangkat Daerah. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Matriks Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program**  
**Pada Sekretariat Daerah**

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Optimalisasi fasilitasi peningkatan kualitas administrasi Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Memfasilitasi perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Mengoptimalkan penataan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengembangan kinerja perangkat daerah;	Menyelenggarakan akuntabilitas dan pengembangan kinerja, penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah, serta penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan;	Program Kelembagaan ,Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan kinerja
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik			

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	Meningkatkan tugas koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial;	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan, budaya, kependidikan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial;	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
				Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum	Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum
				Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti	Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;	Melaksanakan pelayanan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;	Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah
				Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	Meningkatkan Partisipasi dan koordinasi perangkat daerah terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undang di Bidang Cukai	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penggaran serta pelaksanaan APBD;	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penggaran serta pelaksanaan APBD;	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan
				Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Memfasilitasi pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
				Indeks Kepuasan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah;	Melaksanakan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah;	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan
				Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi	Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
			Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	Meningkatkan Sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah	Memberikan pelayanan yg optimal di internal perangkat daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dimaksud diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	Bagian Pemerintahan dan Otda
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	70%	Bagian Organisasi
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	80%	Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	Bagian Kesra
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	Bagian Hukum
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	65%	Bagian Perekonomian

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	Bagian Perekonomian
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	Bagian Adbang
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	76	Bagian PBJ
		Indeks Kepuasan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	76%	Bagian Humas dan Protokol
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi	100%	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3.	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	79	Bagian Umum

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
1.	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	396.592.927
2.	Program Kelembagaan ,Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan kinerja	522.872.511
3.	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	781.725.000
4.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	688.836.802
5.	Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	436.998.000

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	188.412.049
7.	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	423.365.425
8.	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	478.000.000
9.	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan	930.701.098
10.	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	7.985.227.336
11.	Program Pelayanan Kesekretariatan	20.359.554.192,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>33.192.285.340,50</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Rata-Rata % Capaian</b>
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

**A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020**

Secara umum, ada 3 (buah) sasaran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah yang terjabar dalam 12 (dua belas) buah indikator kinerja, sedangkan pencapaian dari indikator kinerja tersebut pada Tahun anggaran 2020 menunjukkan hasil 10 (sepuluh) indikator kinerja berkategori sangat baik, 1 (satu) buah indikator kinerja berkategori baik dan 1 (buah) indikator kinerja berkategori cukup. Pencapaian tersebut diuraikan dalam tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemda	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	69,39%	81,64%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	70%	50,00%	71,43%
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	80%	80%	100,00%
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	84%	98,82%
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	99%	116,47%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	65%	65%	100,00%
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	100%	100,00%
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	91%	107,06%
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	76	76	100,00%
		Indeks Kepuasan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	76	93	122,37%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi	100%	100%	100,00%
3	Terpenuhinya pelayanan sekretariat	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	79	100	126,58%

Secara garis besar, dari tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) buah sasaran sekretariat daerah yang dijabarkan dalam 12 indikator kinerja, dengan masing – masing capaian : 10 indikator kinerja mendapatkan hasil sangat baik, 1 indikator kinerja mendapatkan hasil baik dan 1 buah indikator kinerja menunjukkan hasil cukup.

**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	-	56,39%	69,39%
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	70%	-	60%	50%
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	80%	-	80%	80%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	-	92%	84%
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	-	105%	99%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	65%	-	60%	65%
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	-	100%	100%
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	-	85%	91%
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	76	-	75	76
		Indeks Kepuasan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	76	-	75	93
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi	100%	-	100%	100%
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	79	-	100	100

**TABEL 3.3****PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SD AKHIR PERIODE RENSTRA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TINGKAT KEMAJUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	90%	69,39%	69,39%
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	50,00%	55,56%
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	100%	80%	96,39%
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan danKeagamaan	90%	84%	93,44%
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	90%	99%	110,23%
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	80%	65%	65,00%
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	90%	91%	107,40%
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	80	76	95,00%
		Indeks Kepuasan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	80	93	116,25%
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi	100%	100%	100,00%
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	80.50	100	124,22%

**TABEL 3.4**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	69,39%	0	0
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	50,00%	0	0

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI 2020</b>	<b>REALISASI NASIONAL</b>	<b>KET (+/-)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	80%	0	0
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	84%	0	0
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	99%	0	0
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti	65%	0	0
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	0	0
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	91%	0	0
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	76	0	0
		Indeks Kepuasan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah	93	0	0
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi	100%	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)
1	2	3	4	5	6
3	Terpenuhinya pelayanan pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	100	0	0

**TABEL 3.5**  
**ALOKASI PERSASARAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	396.592.927	1,19%
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	522.872.511	1,58%
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik		0,00%
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	781.725.000	2,36%
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	688.836.802	2,08%
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	436.998.000	1,32%
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	188.412.049	0,57%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	423.365.425	1,28%
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	478.000.000	1,44%
		Indeks Kepuasan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah	930.701.098	2,80%
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi	7.985.227.336	24,06%
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	20.359.554.192,50	61,34%
<b>TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SETDA</b>			<b>33.192.285.340,50</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa nilai anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah sebesar Rp. 33.192.285.340,50 digunakan sepenuhnya untuk membiayai indikator kinerja, yang merupakan turunan dari visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.

**TABEL 3.6**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENDUKUNG	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85%	69,39%	81,64%	396.592.927	260.881.377	65,78%
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Program Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan kinerja	70%	50,00%	71,43%	522.872.511	489.576.261	93,63%
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik		80%	80%	100%			
Rata-rata pencapaian : 85,7%									
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	84%	98,82%	781.725.000	657.480.000	84,11%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENDUKUNG	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	85%	99%	116,47%	688.836.802	559.695.500	81,25%
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	65%	65%	100,00%	436.998.000	430.223.400	98,45%
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100%	100%	100,00%	188.412.049	173.883.750	92,29%
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	85%	91%	107,06%	423.365.425	403.630.084	95,34%
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	76	76	100,00%	478.000.000	443.540.000	92,79%
		Indeks Kepuasan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan	76	93	122,37%	930.701.098	862.863.098	92,71%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENDUKUNG	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	100%	100%	100,00%	7.985.227.336	7.799.733.101	97,68%
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretria tan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	Program Pelayanan Kesekretariatan	79	100	126,58%	20.359.554.192,50	19.212.245.477,00	94,36%
				<b>Rata –rata capaian</b>		<b>102,03 %</b>	<b>33.192.285.340,50</b>	<b>31.293.752.048,00</b>	

Dari tabel 3.6 didapat gambaran bahwa rata – rata pencapaian indikator kinerja pada Sekretariat Daerah adalah sebesar 102,03% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.192.285.340,50 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.293.752.048,00 atau sebesar 94,28%.

**TABEL 3.7**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	81,64%	65,78%	15,86%
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	71,43%	93,63%	-7,9%
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	100%	-	-
		Rata-rata capaian indikator = 85,7%			
2	Meningkatnya peran koordinasi dan moneyv dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Moneyv Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	98,82%	84,11%	14,72%
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	116,47%	81,25%	35,22%
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100,00%	98,45%	1,55%
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100,00%	92,29%	7,71%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	107,06%	95,34%	11,72%
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	100,00%	92,79%	7,21%
		Indeks Kepuasan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah	122,37%	92,71%	29,66%
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi	100,00%	97,68%	2,32%
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	126,58%	94,36%	32,22%
<b>RATA-RATA EFISIENSI</b>					<b>13,66%</b>

Dari tabel 3.7 dapat diketahui bahwa dalam pencapaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah melakukan efisiensi sebesar 13,66%.

Adapun penjabaran dari masing – masing pencapaian indikator kinerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah daerah.**

Capaian indikator kinerja pada sasaran kesatu, adalah sebagai berikut:

**a. Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah**

Pengukuran Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 69,39%, jika dibandingkan dengan target tahun

2020 sebesar 85% maka capaiannya adalah sebesar 81,64% atau berkategori **baik**. Hasil ini tidak lepas dari upaya Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 56,39% maka realisasi di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka mengalami peningkatan sebesar 69,39%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah senilai Rp. 396.592.927,00 atau sebesar 1,19% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 260.881.377,00 atau sebesar 65,78%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 15,86%.

**b. Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.**

Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (Lakip) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 50%, jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 70% maka capaiannya adalah 71,43% atau berkategori **Cukup**. Kendala pencapaian target karena pengumpulan dokumen LKj-PD pada tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan secara tepat waktu, yaitu per tanggal 28 Februari 2020, banyak perangkat daerah yang mengumpulkan LKj-PD melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi agar target tercapai adalah dengan mengirimkan surat permintaan kepada Perangkat daerah dan memberikan teguran kepada Perangkat Daerah yang belum mengumpulkan. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 60% maka realisasi di tahun 2020 mengalami

penurunan sebesar 10%, hal ini disebabkan karena terjadinya wabah/pandemi corona virus disease 2019 sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya adalah sebesar 55,56%.

c. **Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik.**

Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 80%, jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 80% maka capaiannya adalah 100% atau berkategori **Sangat Baik**. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan survey di unit pelayanan publik secara menyeluruh dengan melibatkan pihak ketiga agar pelaksanaan survey lebih maksimal hasilnya. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 80% maka realisasi di tahun 2020 adalah sama. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya adalah sebesar 96,39%. Untuk mendukung 2 indikator kegiatan, yaitu Presentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (Lakip) secara tepat waktu dan Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 522.872.511,00 atau sebesar 1,19% dari total belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 489.576.261,00 atau dengan prosentase realisasi sebesar 93,63%.

**2. Sasaran 2 : Meningkatkan peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah**

Sasaran kedua memiliki sebanyak 8 (delapan) buah indikator kinerja. Adapun capaian indikator kinerja pada sasaran kedua, adalah sebagai berikut:

a. **Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan**

Pengukuran terhadap Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 84%, jika dibandingkan

dengan target tahun 2020 sebesar 85% maka capaiannya adalah sebesar 98,82% atau berkategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 92% maka realisasi ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka mengalami peningkatan sebesar 93,44%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan senilai Rp. 781.725.000,00 atau sebesar 2,36% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 657.480.000,00 atau sebesar 84,11%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 14,72%.

b. **Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan**

Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 99%, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 85% maka capaiannya adalah sebesar 116,47% atau berkategori **sangat baik**. Capaian tersebut dikarenakan ada dua Output Kinerja realisasinya yang melebihi target yaitu Jumlah Peraturan Daerah yang diundangkan target 7 Peraturan Daerah, Realisasinya 14 Peraturan Daerah dan Jumlah Keputusan Bupati yang diundangkan target 200 Keputusan Bupati, Realisasinya 310 Keputusan Bupati

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 105% maka realisasi ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka mengalami peningkatan sebesar 110,23%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan

Hukum, Dokumentasi senilai Rp. 688.836.802,00 atau sebesar 2,08 % dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 559.695.500,00 atau sebesar 81,25%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 35,22%.

c. **Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti**

Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 65%, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 65% maka capaiannya adalah sebesar 100% atau berkategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 65% maka realisasi ditahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka mengalami kemajuan sebesar 65%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah senilai Rp. 436.998.000,00 atau sebesar 1,32% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 436.998.000,00 atau sebesar 98,45%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 1,55%.

d. **Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai**

Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 100% maka capaiannya adalah sebesar 100% atau berkategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 100% maka realisasi ditahun 2020 adalah sama. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka mengalami kemajuan sebesar 100%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai senilai Rp. 188.412.049,00 atau sebesar 0,57% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 173.883.750,00 atau sebesar 92,29%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 7,71%.

e. **Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev**

Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 91%, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 85% maka capaiannya adalah sebesar 107,06% atau berkategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 85% maka realisasi ditahun 2020 adalah mengalami peningkatan sebesar 6%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka mengalami kemajuan sebesar 107,40%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan senilai Rp. 423.365.425,00 atau sebesar 1,28% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 403.630.084,00 atau sebesar 95,34%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 11,72%.

f. **Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ**

Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 76%, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 76% maka capaiannya adalah sebesar 100% atau berkategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 75% maka realisasi ditahun 2020 mengalami peningkatan sebesar

1%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya adalah sebesar 95%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp. 478.000.000,00 atau sebesar 1,44% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 443.540.000,00 atau sebesar 92,79%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 7,21%.

g. **Indeks Kepuasan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah**

Indeks Kepuasan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 93%, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 76% maka capaiannya adalah sebesar 122,37% atau berkategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 75% maka realisasi ditahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya adalah sebesar 116,25%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan senilai Rp. 930.701.098,00 atau sebesar 2,80% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 862.863.098,00 atau sebesar 92,71%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 29,66%.

h. **Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi**

Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 100% maka capaiannya adalah sebesar 100% atau berkategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar

100% maka realisasi ditahun 2020 adalah tetap. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya adalah sebesar 100%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan senilai Rp. 7.985.227.336,00 atau sebesar 24,06% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 7.799.733.101,00 atau sebesar 97,68%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 2,32%.

### **3. Sasaran 3 : Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**

Sasaran ketiga Sekretariat Daerah memuat 1 (satu) buah indikator kinerja, adapun penjelasan dari pencapaian indikator kerjanya adalah :

#### **a. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan**

Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan pada tahun 2020 memperoleh realisasi sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 70% maka capaiannya adalah sebesar 126,58% atau berkategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 sebesar 100% maka realisasi ditahun 2020 adalah tetap. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya adalah sebesar 124,22%.

Untuk mendukung indikator kinerja tersebut maka pada tahun 2020, Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Pelayanan Kesekretariatan senilai Rp. 20.359.554.192,50 atau sebesar 61,34% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah dan terealisasi sebesar Rp. 19.212.245.477,00 atau sebesar 94,36%. Sedangkan tingkat efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 32,22%.

## B. KINERJA KEUANGAN

### 1. PENDAPATAN

Pada tahun anggaran 2020, Sekretariat daerah Kab. Bangkalan memperoleh anggaran pendapatan sebesar Rp. 13.299.795.941,80. Dari target tersebut, sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 13.621.358.514,80 atau 102,42 %

### 2. BELANJA

Total anggaran belanja sekretariat daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 52.778.153.535,50 dan terealisasi sebesar Rp. 50.241.331.314,00 atau 95,19%. Anggaran Belanja Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 19.425.469.696,00 dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 33.352.683.839,50 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
I.	Pendapatan	13.299.795.941,80	13.621.358.514,80	102,42
II.	Belanja Tidak Langsung KDH/WKDH	1.004.201.650,00	741.048.756,00	73,79
	BELANJA SETDA			
III.	Belanja Tidak Langsung	19.425.469.696,00	18.880.929.266,00	97,20
IV.	Belanja Langsung :			
1.	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	188.412.049,00	173.883.750,00	92,29

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
2.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	9.843.374.700,50	9.224.598.083,00	93,71
3.	Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	1.636.372.021,00	1.176.712.348,00	71,91
4.	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	40.236.950,00	39.881.950,00	99,12
5.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.792.817.979,00	3.752.790.446,00	98,94
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.852.121.200,00	3.840.120.050,00	99,69
7.	Peningkatan Disiplin Pegawai	553.241.000,00	546.975.000,00	98,87
8.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	728.027.350,00	467.484.600,00	64,21
9.	Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	103.943.750,00	82.528.750,00	79,40
10.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	35.814.800,00	27.549.800,00	76,92
11.	Penyusunan Laporan Keuangan	29.770.650,00	21.892.500,00	73,54
12.	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional dan Hari Besar Lainnya	109.075.000,00	89.986.150,00	82,50
13.	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum	194.714.500,00	81.752.750,00	41,99
14.	Fasilitasi Bina Kecamatan dan Kelurahan	44.750.307,00	41.489.207,00	92,71
15.	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	157.128.120,00	137.639.420,00	87,60
16.	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial	148.100.000,00	113.470.000,00	76,62
17.	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan	624.275.000,00	534.710.000,00	85,65
18.	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	9.350.000,00	9.350.000,00	99,47
19.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	189.471.350,00	189.471.350,00	100,00
20.	Fasilitasi Bantuan Hukum	339.440.102,00	211.043.000,00	62,17
21.	Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	159.925.350,00	159.181.150,00	99,53
22.	Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	57.665.600,00	54.170.600,00	93,94
23.	Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pembinaan	236.130.400,00	233.183.300,00	98,75

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	dan Pengembangan Produk Daerah			
24.	Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan BUMD	143.202.000,00	142.869.500,00	99,77
25.	Pengendalian Pembangunan Daerah	102.655.121,00	98.999.080,00	96,44
26.	Koordinasi, Evaluasi, dan Pelaporan Daerah	320.710.304,00	304.631.004,00	94,99
27.	Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa	60.200.000,00	52.190.000,00	86,69
28.	Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui Bagian PBJ	417.800.000,00	391.350.000,00	93,67
29.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan	150.085.164,00	146.285.164,00	97,47
30.	Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	151.259.502,00	146.912.002,00	97,13
31.	Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja	221.527.845,00	196.379.095,00	88,65
32.	Koordinasi Kehumasan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	40.630.000,00	28.405.000,00	69,91
33.	Penyebarluasan informasi KDH/WKDH, Sekretaris Daerah	612.964.600,00	586.869.000,00	95,74
34.	Koordinasi Keprotokolan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	277.106.498,00	247.589.098,00	89,35
35.	Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	2.801.657.523,00	2.697.565.633,00	96,28
36.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan	5.183.569.813,00	5.102.167.468,00	98,43
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>33.352.683.839,50</b>	<b>31.360.402.048,00</b>	<b>94,03</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>52.778.153.535,50</b>	<b>50.241.331.314,00</b>	<b>95,19</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa pembangunan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Di masa mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan. Sekretariat Daerah Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang lebih efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.

Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM apratur yang professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Sekretariat Kabupaten Bangkalan berbagai langkah kolaborasi dengan

berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Bangkalan. LKj ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kerja (*Performen Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2018 - 2023

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH							SASARAN							STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	TARGET										
			2019	2020	2021	2022	2023			Transisi 2024	2019	2020	2021	2022					2023	Transisi 2024
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Optimalisasi fasilitas peningkatan kualitas administrasi Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Memfasilitasi perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan dan Otda
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (62)	B(70)	BB(72)	BB(80)	A (81)	A (83)		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Mengoptimalkan penataan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengembangan kinerja perangkat daerah;	Menyelenggarakan akuntabilitas dan pengembangan kinerja, penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah, serta penataan kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan;	Program Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan kinerja	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	82.29	82.3	82.5	82.6	82.7	82.8		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	80%	80%	90%	90%	100%	100%				Bagian Organisasi
									Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan tugas koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial;	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan keagamaan, budaya, kependidikan, kepemudaan dan kesejahteraan sosial;	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	Bagian Kesra

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH							SASARAN							STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	TARGET									
			2019	2020	2021	2022	2023			Transisi 2024	2019	2020	2021	2022					2023
									Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum	Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	Bagian Hukum
									Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti	60%	65%	70%	75%	80%	100%	Meningkatkan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;	Melaksanakan pelayanan administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;	Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	Bagian Perekonomian
									Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Partisipasi dan koordinasi perangkat daerah terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undang di Bidang Cukai	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Bagian Perekonomian
									Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD;	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penggaran serta pelaksanaan APBD;	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Bagian Adbang
									Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	75	76	77	78	80	80	Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Memfasilitasi pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH							SASARAN							STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	TARGET									
			2019	2020	2021	2022	2023			Transisi 2024	2019	2020	2021	2022					2023
									Indeks Kepuasan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah	75	76	77	78	80	80	Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah;	Melaksanakan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah;	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan	Bagian Humas dan Protokol
									Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
								Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	78.5	79	79.5	80	80.5	80.5	Meningkatkan Sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah	Memberikan pelayanan yg optimal di internal perangkat daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Bagian Umum



## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. MOH. TAUFAN ZS., MM.**  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **R. ABDUL LATIF AMIN IMRON**  
Jabatan : Bupati Bangkalan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 2 Oktober 2020

PIHAK KEDUA

BUPATI BANGKALAN

  
**R. ABDUL LATIF AMIN IMRON**

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. H. MOH. TAUFAN ZS., MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196406101992021002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2020**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	Bagian Pemerintahan dan Otda
		Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	70%	Bagian Organisasi
		Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	80%	Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	Bagian Kesra
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	Bagian Hukum
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	65%	Bagian Perekonomian
		Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai	100%	Bagian Perekonomian
		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	Bagian Adbang
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	76	Bagian PBJ
		Indeks Kepuasan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	76%	Bagian Humas dan Protokol
		Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi	100%	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3.	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	79	Bagian Umum

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	396.592.927
2.	Program Kelembagaan ,Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan kinerja	522.872.511
3.	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	781.725.000
4.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	688.836.802
5.	Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	436.998.000
6.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	188.412.049
7.	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	423.365.425
8.	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	478.000.000
9.	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan	930.701.098
10.	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	7.985.227.336
11.	Program Pelayanan Kesekretariatan	20.359.554.192,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>33.192.285.340,50</b>

Bangkalan, 2 Oktober 2020

PIHAK KEDUA

**BUPATI BANGKALAN**

**R. ABDUL LATIF AMIN IMRON**

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. H. MOH. TAUFAN ZS., MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 196406101992021002

## PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN DI TAHUN 2020

NO	TANGGAL	PENYELENGGARA/ PENANGGUNG JAWAB	JENIS PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	27 Januari 2020	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	PENGHARGAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019 DENGAN PREDIKAT NILAI "B"	Kabupaten Bangkalan untuk kedua kalinya memperoleh predikat nilai "B" setelah melalui usaha keras dan proses yang panjang, yaitu bersinergi dengan Perangkat Daerah dengan didukung oleh Kepala Daerah dengan cara mengintegrasikan perencanaan yang tepat, penganggaran dengan output program yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaporan yang transparan.
2.	7 Desember 2020	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	PENGHARGAAN SEBAGAI KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA	Penghargaan ini diberikan dalam rangka rangkaian kegiatan peringatan Hak Asasi Manusia sedunia tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

NO	TANGGAL	PENYELENGGARA/ PENANGGUNG JAWAB	JENIS PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.	13 November 2020	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik TA.2020	Kabupaten Bangkalan meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Top 30 Kovablik 2020. Penghargaan ini diberikan pada tanggal 13 November 2020 di Singasari Resort Batu, dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur, dan melalui Dinas Petanian, Tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan dengan mengusung konsep Taring Bang Jani (Sistem Tanam Jaring sebagai salah satu Inovasi Bangun Bangkalan, Sejahterakan Petani).

